



Buletin Parlementaria

Nomor 1214/V/VIII/2022 • Agustus 2022



Komisi III Dorong Penuh Polri Ungkap Kasus Brigadir J Secara Transparan



3 Bertemu Ketua
Parlemen
Timor Leste,
Puan Maharani
Dorong 'Bilateral
Investment Treaty'



4 Muhaimin
Iskandar Dorong
Peningkatan Kerja
Sama Indonesia-
Jepang di Berbagai
Bidang



9 772614 339005



Media
DPR RI

Komisi III Dorong Penuh Polri Ungkap Kasus Brigadir J Secara Transparan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyatakan Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap Kapolri beserta seluruh jajaran Polri yang telah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen FS secara profesional dan akuntabel. Komisi III DPR RI juga mendesak Polri untuk memperbaiki sistem dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan baik kelembagaan maupun kultural.

Hal itu disampaikan Adies saat konferensi pers Komisi III DPR RI dengan Kapolri usai Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran Polri, di antaranya Wakapolri Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dedi Prasetyo serta segenap jajaran Mabes Polri, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

"Komisi III DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolri beserta jajaran sejak pukul 10.00 WIB pagi hingga pukul 20.30 WIB. Jadi, Komisi III DPR RI sangat perhatian terhadap kasus Irjen FS dan Brigadir J ini yang sangat menjadi perhatian masyarakat. Kapolri tadi telah menjawab 45 pertanyaan dari 54 pertanyaan dari Anggota Komisi



FOTO: JAKA/NVL

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat lonferensi pers Komisi III DPR RI dengan Kapolri.

III terhadap inti kasus dari unsur pidana, *obstruction of justice* maupun unsur-unsur berkaitan kasus tersebut yang berkembang ditengah-tengah masyarakat," ujar Adies.

Politisi Partai Golkar tersebut menyampaikan apresiasi terhadap Kapolri yang juga telah menyetujui beserta segenap jajaran Polri untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Kemudian, sambung Adies, Kapolri juga telah menyetujui beserta segenap jajaran Polri untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto memaparkan, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Komisi III DPR RI mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara pidana dalam peristiwa Duren Tiga secara profesional,

transparan dan akuntabel. Kedua, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akuntabel.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan akan segera melaksanakan seluruh rekomendasi dari Komisi III DPR RI selaku mitra kerja yang menjadi modal Polri untuk terus bekerja lebih maksimal ke depannya. "Kami akan segera melakukan perbaikan dan pembenahan internal dan juga melaksanakan tugas-tugas pokok Polri serta tugas-tugas untuk mengawal kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai macam kegiatan G20, dan juga kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah," tandas Kapolri saat konferensi pers. • pun/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste, Puan Maharani Dorong *Bilateral Investment Treaty*



FOTO: RUNI/NWI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima kunjungan Ketua Parlemen Republik Timor Leste, Aniceto Guterres Lopes.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Parlemen Republik Timor Leste, Aniceto Guterres Lopes di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Sejumlah hal penting dibicarakan dalam pertemuan antar Ketua Parlemen dua negara bertetangga tersebut, termasuk usulan Puan soal Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi (*Bilateral Investment Treaty*).
"Saya mendorong kedua negara untuk segera membentuk

Bilateral Investment Treaty untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong lebih banyak lagi investasi Indonesia ke Timor-Leste," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Usulan tersebut diawali dengan data yang disampaikan Puan bahwa nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai 818 juta dolar Amerika Serikat, terutama di sektor perbankan, migas dan telekomunikasi. "Saya juga ingin mengapresiasi kepercayaan Timor-Leste terhadap perusahaan Indonesia untuk kerja sama investasi dan infrastruktur di Timor-Leste," ujar Puan.

Selain perjanjian investasi, Puan juga mendorong kerja sama antarkomunitas bisnis kedua negara yang turut mengalami dampak pandemi Covid-19. Hal ini mengingat badan usaha yang dimiliki pengusaha WNI di Timor-Leste menurun akibat pandemi. "Untuk itu kemudahan perdagangan harus kita lakukan perdagangan harus kita lakukan perdagangan di perbatasan," ujar Puan kepada Lopes. • **ann/sf**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Soss, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Wiryanan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonarricha Firsta Dysie, Belgays Maeshyntha, Anju Alfionco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Adhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Armanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savanti Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: DEVI/NVL

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat bertukar cenderamata dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia H.E. Kanasugi Kenji.

Muhaimin Iskandar Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Jepang di Berbagai Bidang

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

(Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia H.E. Kanasugi Kenji. Pertemuan tersebut membahas penguatan

kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk penanganan pandemi Covid-19.

"Ada dua isu yang dibahas dalam pertemuan. Pertama mengenai penguatan kerja sama dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri otomotif dan kedua mengenai peningkatan kerja sama di bidang investasi, dan

kerja sama ekonomi lainnya," kata Gus Muhaimin usai memimpin pertemuan DPR RI dengan Duta Besar Jepang di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Dalam pertemuan tersebut, Gus Muhaimin yang didampingi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dan Anggota DPR RI Daniel Johan juga membahas mengenai dampak pandemi Covid-19. "Ke depan, kami berharap ada kerja sama di bidang teknologi kesehatan. Sehingga kami tidak tergapag dalam menangani isu-isu kesehatan ke depan," kata Gus Muhaimin lebih lanjut.

Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan akan terus meningkatkan komunikasi DPR RI dengan Dubes Jepang untuk Indonesia guna meningkatkan kerja sama yang baru dan mengatasi isu-isu yang ada dan bisa dicarikan solusi yang tepat bagi Indonesia dan Jepang. ● rnm/sf

Terima Perwakilan Kerajaan dan Kesultanan, **Rachmat Gobel:** **MAKN Dapat Berperan Perkuat Produk Ekraf**



FOTO: AZKA/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berfoto bersama perwakilan Raja dan Sultan yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima perwakilan kerajaan dan Sultan yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8). Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) mengungkapkan adanya potensi kerajaan dan kesultanan untuk ikut berperan aktif memperkuat produk-produk ekonomi kreatif terlebih terdapat nilai sejarah dan budaya pada produk yang dihasilkan.

"Sebelum ke sini saya lihat dulu pameran *handycraft* di JIExpo. Dari situ, kalau diangkat sama para pengerajinnya ini ada nilai sejarah dan cerita. Ukiran juga *kan* dari Sabang sampai Merauke berbeda, makanan kita juga berbeda

semua berbeda, beraneka. Jadi ini yang menurut saya harus kita perkuat. *Nah* di sini lah peran dari MAKN untuk memperkuat produk-produk usaha kecil, produk-produk ekonomi kreatif yang diwariskan dari leluhur kita sehingga menjadi produk yang bernilai tambah," ungkap politisi Partai NasDem tersebut.

Tak hanya terkait dengan ekonomi, Gobel juga berpesan agar kerajaan dan kesultanan yang bergabung dengan MAKN juga bisa ikut membangun sumber daya manusia Indonesia. "Kerajaan kita apa yang mau kita tonjolkan? Apakah bangunannya atau kita mau membangun sumber daya manusia? Dengan nilai-nilai sejarah, kerajaan bisa menjadi bagian membangun SDM-SDM Indonesia yang seutuhnya. Ada nilai-nilai daripada leluhur, sejarah, keteladanan yang diberikan kepada kita semua," tambah anggota dewan dipil Gorontalo tersebut.

MAKN diwakili Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo selaku Sekretaris Jenderal didampingi Humas MAKN Poppy Amalya. Selain itu turut hadir pula beberapa pemimpin dari kesultanan dan kerajaan yang bergabung pada organisasi tersebut termasuk Sultan Deli XIV yang merupakan Sultan termuda.

"Kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ada lah sebagai cagar budaya dan kami bertugas menjaga, melestarikan, melindungi adat tradisi budaya. Tetapi bukan hal ini saja, semua elemen yang ada di dalamnya juga perlu negara ikut andil untuk menjaganya. Jadi sebetulnya kerajaan nusantara ini adalah sebagai akar dan sumbernya budaya dan meliputi semua elemen. Dari wastranya, kulinernya, naskah, sejarahnya lalu industrinya lalu segala macam," jelas Raden Ayu Yani, Sekjen MAKN yang juga Pengageng Kesultanan Sumenep. ● **uc/sf**

Effendi Simbolon Usulkan PM Kominfo tentang PSE Lingkup Privat Diperkuat



Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Kominfo.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sudah dijalankan lebih dari satu tahun. Sejauh ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sejumlah PSE karena belum terdaftar dan tidak sesuai seperti Paypal, Steam dan lainnya. Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon meminta Permenkominfo yang telah ditetapkan itu harus diperkuat.

Sebab menurut politisi PDI-Perjuangan ini, peraturan menteri yang ada dinilai masih lemah, sehingga berisiko untuk dibatalkan pihak-pihak yang dirugikan. "Kalau hanya peraturan menteri, saya kira

lemah. Harus diperkuat dengan mengeluarkan Perppu. Jika perlu intinya harus yang lebih kuat dari itu," pungkas Effendi saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Kominfo, di Kantor Pusat Kominfo, Jakarta, Senin (22/8).

Effendi mengatakan, Indonesia dikelilingi dengan negara yang memperbolehkan situs yang telah dilarang di dalam negeri, sehingga

”

PERMENKOMINFO INI MENGATUR BANYAK HAL, MULAI PERSOALAN PENDAFTARAN, TATA KELOLA, MODERASI INFORMASI ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK

kerja keras Kominfo akan percuma apabila tidak disosialisasikan dengan benar. "Seperti situs porno dan judi di negara tetangga itu kan ada yang legal, sedangkan dari sini pun kita bisa akses, jadi akan percuma. Makanya itu saya usulkan perkuat Permen-nya," sebut legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Secara garis besar, Permenkominfo ini mengatur banyak hal, mulai persoalan pendaftaran, tata kelola, moderasi informasi atau dokumen elektronik, dan permohonan pemutusan akses atas informasi atau dokumen yang dilarang. Namun, aturan tersebut juga mengatur pemberian akses data pribadi untuk kepentingan pengawasan penegakan hukum, serta sanksi administratif yang mungkin dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia. • **tn/aha**



Riyanta Dukung Menteri ATR/BPN Berantas Mafia Pertanahan

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mendukung penuh aksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang memberantas mafia pertanahan yang masih merajalela. Ia mengusulkan agar Kementerian ATR/BPN memperbaiki administrasi pertanahan untuk meminimalisir sengketa dan konflik, serta mempersempit ruang gerak mafia tanah di berbagai daerah.

"Pertama yang harus dilakukan adalah menegakkan disiplin di tubuh BPN. Kalau di sana ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum PNS di BPN, saya mendorong agar diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pidananya jalankan dulu, kemudian sanksi etik dan administrasinya juga harus jalan," terang Riyanta kepada **Parlementaria** di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

”

**KALAU ADA
PELANGGARAN
DISIPLIN OLEH
PNS, HARUS
DITEGAKKAN
SESUAI DENGAN
PERATURAN
PEMERINTAH**

Politisi PDI-Perjuangan itu mengingatkan, agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. "Kalau ada pelanggaran disiplin oleh PNS, harus ditegakkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana pidananya? Pidananya, ya pidana! Mengikuti aturan KUHP dan KUHP," tegasnya.

Anggota Komisi II
DPR RI Riyanta.



Riyanta menyampaikan, sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk men-*support* kebijakan Menteri Hadi Tjahjanto dalam pemberantasan mafia pertanahan yang dimulai dari internal Kementerian ATR/BPN sendiri.

"Tugas kita sekarang mendukung menteri. Fungsi DPR yang kaitannya dengan pengawasan, tidak mesti teriak-teriak. Ketika pemerintah sudah benar, kita *support*," pungkas legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Mafia Tanah Membuat Konsumen Sengsara", Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan, dalam memberantas praktik mafia tanah, pihaknya bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan RI dengan membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pertanahan. •
es/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: ARIEF/NVL

Agung Budi Santoso Dukung Langkah Kapolri 'Bersih- Bersih' Internal

Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso mendukung langkah tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan 'bersih-bersih' internal, buntut dari kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Irjen FS yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.

"Dari berita yang beredar kasus ini sudah sangat keruh, dan bapak berani dan tegas untuk melakukan 'bersih-bersih' internal," ujar ABS, sapaan akrabnya, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan jajaran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

ABS juga mendorong Kapolri agar kasus Brigadir J ini segera dituntaskan, mengingat sudah sangat banyak hoaks yang beredar sehingga menyebabkan terjadinya disinformasi. Masyarakat juga menunggu *ending* dari kasus ini. "Karena banyak juga yang hoaks, sehingga kita tidak mengerti mana yang betul dan mana yang salah. Semoga dengan hasil rapat ini bisa menepis berita-berita belum jelas yang banyak beredar di masyarakat," tambah ABS.

Lebih lanjut ABS mengingatkan, masih banyaknya pekerjaan rumah yang mesti dibenahi di tubuh Polri



Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso saat mengikuti Raker Komisi III DPR RI dengan jajaran Polri.

ini. Tidak hanya kasus Brigadir J, maupun Konsorsium 303, ia juga mencatat beberapa perilaku oknum Polri yang tidak tepat di daerah. "Seperti (oknum polisi) yang kemarin tertangkap membawa uang Rp4,4 miliar yang diduga untuk masuk menjadi polisi, kemudian ada Kapolsek memperkosa anak tetangga, artinya ini harus dimulai dari moral," ujar ABS.

Legislator dapil Jawa Barat I ini menyampaikan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo selalu memegang teguh semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni *Ing ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* dalam memimpin, sehingga bisa menerapkan nilai yang terkandung dalam semboyan ini juga pada seluruh polisi di Indonesia.

"Ada lebih dari 400 ribu anak-anak (personel Polri) Bapak, tentunya Bapak sudah menjalankan apa yang menjadi pedoman orang

Jawa. Sebagai pemimpin tentunya Bapak juga harus menularkan sikap yang mulia ini kepada bapak-bapak yang lain di bawah Pak. Di daerah ada Kapolda dan Kapolres, sampai tingkat Polsek. Saya kira kalau semua pimpinan Polri pada semua tingkatan, semua mengerti apa yang Bapak ajarkan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan ini," yakin politisi Partai Demokrat ini.

Di akhir, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI berharap agar kasus yang melibatkan Irjen FS dan puluhan personel Polri ini segera selesai agar Kapolri bisa menyelesaikan kasus-kasus lain yang sama seriusnya. "Jabatan bapak harus menjadi *legacy*, sebagai citra Polri yang baik, tingkat kepercayaan publik kepada Polri sudah meningkat. Jangan sampai ini turun di bawah kepemimpinan bapak," tutup ABS. ● **we/sf**



Terima Dubes Australia, Komisi IV Bahas Bantuan Australia untuk Penanganan PMK

Komisi IV DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM.

Kunjungan ini membahas mengenai bantuan yang ingin diberikan Australia terhadap Pemerintah Indonesia terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kedatangan Dubes Australia diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin didampingi jajaran Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Rusdi Masse Mappasessu, Anggia Erma Rini serta Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus.

"Jadi hari ini Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM datang ke Komisi IV.

Kami terima dengan senang hati, dikarenakan Pemerintah Australia sangat *affair* ingin membantu Pemerintah Indonesia dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, kurang lebih nilainya hampir 10 juta dolar Australia," ujar Sudin usai pertemuan di Ruang Pimpinan Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).

Bantuan senilai 10 juta dolar Australia yang diberikan Pemerintah Australia ini berbentuk vaksin dan juga *ear tag*. "*Ear tag* itu istilahnya tanda bahwa ini (sapi) sudah divaksin. Seperti kita, kita kan ada kartu vaksin, sama dia juga. *Ear tag* itu tujuannya untuk itu, supaya menandai bahwa ini (sapi) sudah divaksin, ini belum," ucap Sudin. Politisi PDI-Perjuangan

tersebut menjelaskan, hubungan Australia dan juga Indonesia telah cukup lama terjalin, termasuk dalam hal perdagangan, bukan hanya dalam hal perdagangan sapi. Sudin pun menyatakan dirinya sempat menyinggung adanya *surplus* perdagangan Australia-Indonesia yang masih ada ketimpangan. Tak hanya itu Indonesia juga mengimpor sejumlah komoditas pangan dari Australia.

"Dubes Penny mengatakan, kami memasukkan turis (Australia ke Indonesia) cukup banyak. Menghabiskan sekian juta dolar (di Indonesia), terutama ke Bali. Tapi kan perdagangannya kan sangat *jomplang*. Seperti misalnya kita masih impor garam dari (Australia) sana, buah-buahan, gandum dan lain-lain. Maka tadi saya bilang harus ada *take and give*-nya. Kami impor tapi kamu harus siap membantu negara kami untuk masalah yang lain," tandas Sudin.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mengatakan, pertemuan ini juga membahas permasalahan lingkungan hidup. Delegasi Australia juga menekankan mengenai permasalahan kebakaran hutan. "Kebakaran hutan, mereka juga mengakui bahwa di Australia, *every years always happen* kan kebakaran hutan itu. Dan mereka menganggap bahwa Indonesia jangan sampai mengalami hal yang mereka lakukan. Walaupun mereka negara yang maju, bisa menghentikan api dan ternyata untuk kebakaran itu juga susah (diatasi)," tutur Alien. ● gal/sf



FOTO: OJI/ANIL

Komisi IV DPR RI saat foto bersama dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi V Upayakan **Kenaikan Anggaran Kemenhub Sesuai Pagu Kebutuhan**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan RI.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan

RI. Dalam raker ini kedua belah pihak membahas tentang laporan keuangan APBN 2021, realisasi APBN 2022 sampai Agustus 2022, serta rencana kerja anggaran (RKA) 2023. Lasarus mengungkapkan, akan membantu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai mitra kerja dalam memperjuangkan kenaikan anggaran pada 2023.

"Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Kemenhub akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI," papar Lasarus di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).

Politisi PDI-Perjuangan ini

mengungkapkan, melalui forum raker ini, Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk meningkatkan capaian serapan APBN 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI di mana capaian realisasi keuangan per Agustus 2022 telah mencapai 52,6 persen dan realisasi fisik sebesar 57,8 persen.

Adapun pagu kebutuhan yang dipaparkan adalah Rp73,84 triliun, Nota keuangan RAPBN 2023 Rp33,44 triliun dengan selisih Rp40,4 triliun. Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Kemenhub akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada

Kementerian Perhubungan terkait program kerja dan pelaksanaan anggaran. "Terima kasih atas masukan dan diskusi, kami akan meningkatkan apa yang harus dilakukan. Pak Presiden meminta kami untuk memastikan apa yang dilakukan itu berguna bagi masyarakat," katanya.

Menhub menjelaskan, komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp541,15 miliar, Inspektorat Jenderal Rp96,65 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,46 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp8,79 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,18 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp164,69 miliar, BPSDM Perhubungan Rp3,67 triliun, dan BPTJ Rp259,71 miliar. ● **ssb/aha**

Harga BBM Direncanakan Naik, Rieke Pitaloka Minta Perbaiki Data Penerima Subsidi BBM

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah sebelum berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk dapat memperbaiki terlebih dahulu data penerima subsidi BBM yang terintegrasi dengan kementerian terkait. Sebab menurutnya, penerima subsidi, seharusnya adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

"Saya kira subsidi BBM itu Rp502 triliun itu adalah angka yang fantastis dan sepakat dengan teman-teman lain sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, perbaiki dulu data penerima subsidi yang terintegrasi antara Kementerian Sosial dan kementerian lainnya karena penerima subsidi BBM sejatinya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu," kata Rieke dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan membahas laporan keuangan pada APBN TA 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan itu berharap, besarnya anggaran subsidi BBM tersebut dapat benar-benar terserap bagi yang seharusnya mendapatkan. Untuk itu, pihaknya meminta kementerian terkait untuk dapat

”

**JIKA DATA PENERIMA
BBM BERSUBSIDI
BELUM JELAS DAN
TRANSPARAN, PIHAKNYA
AKAN MENOLAK
KENAIKAN
HARGA BBM
BERSUBSIDI**

Anggota Komisi VI
DPR RI Rieke Diah
Pitaloka.



membuka data penerima subsidi BBM dengan jelas dan transparan. Sehingga nantinya, tidak ada indikasi penyimpangan terhadap alokasi subsidi APBN untuk masyarakat.

"Sehingga data penerima subsidi BBM itu dengan angka Rp502 triliun menjadi tepat sasaran dan akurat Rp502 triliun adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan, tentu saja kami membutuhkan dukungan agar Kementerian BUMN membuka siapa saja sesungguhnya data yang diberikan oleh pemerintah paling tidak boleh secara tertutup karena itu data sensitif, tetapi kami ingin mengetahui sebetulnya data penerimanya itu akurat atau tidak," jelas Rieke lebih lanjut.

Terakhir, legislator dapil Jawa Barat VII ini menegaskan, jika data penerima BBM bersubsidi belum jelas dan transparan, pihaknya akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. "Ketika data subsidi BBM belum secara jelas transparan, akurat dapat disampaikan, dan subsidi BBM-nya dari APBN naik terus, saya menyatakan secara pribadi paling tidak saya menolak kenaikan harga BBM subsidi," tutup Rieke. ●

bia/sf

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: ANDRI/NVL

Komisi VII Apresiasi Capaian WTP Kementerian ESDM

Komisi VII DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian laporan keuangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2021 yang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, sejumlah catatan penting juga menyertai capaian WTP tersebut.

"Komisi VII DPR RI memberi apresiasi kepada Menteri ESDM atas pencapaian ini. Akan tetapi BPK memberikan penekanan dan perhatian khusus atas beberapa permasalahan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan KESDM tahun 2021," ucap Eddy saat memimpin rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Dikatakan Eddy, KESDM harus memiliki tata kelola dan pengelolaan keuangan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan seperti diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Politisi PAN ini lalu mengungkapkan dua catatan penting soal pengelolaan keuangan di KESDM. Pertama, PNBK pada KESDM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mencapai Rp84,4 miliar.

”

**KOMISI VII DPR RI
SIAP Mendukung
dan mengawasi
KESDM dalam
menyelesaikan
berbagai
permasalahan
yang ada,”**

Wakil Ketua Komisi VII
DPR RI Eddy Soeparno.

Kedua, piutang bukan pajak pada KESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp24,4 miliar. Pada bagian lain Eddy juga menyampaikan rencana KESDM yang ingin melelang kapal Ardjuna Sakti yang sudah rusak berat. Ini sudah jadi temuan audit BPK untuk laporan keuangan KESDM tahun anggaran 2019. "Komisi VII DPR RI siap mendukung dan mengawasi KESDM dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada," tandas Eddy. • mh/aha



FOTO: OJI/NVL



FOTO: ANDRI/NWL

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat melantik Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

Ashabul Kahfi Gantikan Yandri Susanto Jabat Ketua Komisi VIII

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Abdul Muhaimin Iskandar melantik Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI. Ashabul menggantikan rekan satu fraksinya, Yandri Susanto, yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI.

"Pimpinan yang saya hormati, hari ini sesuai dengan agenda rapat kita akan melakukan penetapan Ketua Komisi VIII DPR RI," kata Muhaimin

saat membuka rapat pelantikan Ketua Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).

Usai membuka rapat, Muhaimin mengungkapkan bahwa rapat pelantikan dilakukan secara tertutup. Pelantikan berlangsung lebih kurang satu jam. Usai pelantikan, mantan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengucapkan selamat atas pelantikan Ashabul.

Yandri pun berharap, Ashabul dapat melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja Komisi VIII,

salah satunya Kementerian Agama terkait pelaksanaan ibadah haji.

"Pesan saya khusus kepada Komisi VIII dan pimpinan baru sesegera mungkin untuk mengevaluasi proses ibadah haji dan persiapan haji tahun depan," tutur Yandri.

Adapun, susunan Pimpinan Komisi VIII DPR RI kini menjadi; Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi (F-PAN), dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan), Ace Hasan Syadzily (F-Golkar), Moekhlis Sidik (F-Gerindra) dan Marwan Dasopang (F-PKB). ● **rnm/sf**

Soroti Anggaran BP2MI, Komisi IX Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Pekerja Migran

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Pada kesempatan tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani memaparkan pertanggungjawaban

realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp312 miliar. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai anggaran itu kecil jika dibandingkan dengan kewajiban lembaga tersebut menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.

Terlebih lagi pada laporan BP2MI juga ditemukan adanya nilai utang kepada rumah sakit rujukan yang digunakan untuk perawatan pekerja migran yang bermasalah. "Dulu pernah dipresentasikan ke kita, anggaran yang ideal agar BP2MI bisa bekerja secara optimal sekitar Rp900 miliar ya Pak Benny ya? Yang ingin saya tanyakan sebetulnya satu Pak, saya ingin mengetahui sebetulnya keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PMI dan ini hanya akan bisa direfleksikan melalui anggaran. Saya ingin menanyakan,

sekarang komunikasi di internal pemerintah seperti apa *sih?*" tanya Charles kepada Kepala BP2MI.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, Komisi IX DPR RI telah berulang kali mengadakan rapat dengan Kepala BP2MI beserta jajaran dan menyetujui kenaikan anggaran pada lembaga tersebut. Namun, menurut Charles hal tersebut tidak dapat direalisasikan tanpa adanya keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, apabila tidak ada realisasi kenaikan anggaran.

"Jadi saya ingin tahu juga komunikasi Bapak dengan Menkeu seperti apa? Dengan Bapak Presiden seperti apa? Apakah ada sebetulnya *political will* dari pemerintah untuk menaikkan anggaran sehingga pekerja migran Indonesia yang sudah menyumbangkan tenaga, keringat untuk bekerja demi keluarganya di Indonesia ini bisa mendapatkan perlindungan yang optimal dari negara," tambah legislator dapil DKI Jakarta III tersebut.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku telah membuka komunikasi dengan pihak Kemenkeu dengan mengirimkan surat untuk audiensi dengan Menteri Keuangan. Hingga rapat dilaksanakan, Benny menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan tanggapan terkait permohonan tersebut. Dalam rapat, BP2MI justru meminta bantuan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI agar audiensi tersebut direalisasikan.

"Saya rasa ini forum yang tepat ya, Pak Benny ya. Kebetulan ini kan rapat terbuka jadi yang disampaikan sudah jelas ya. Ibu Menkeu kalau setidaknya tidak menerima audiensi mungkin kita sudah tahu lah *positioning*-nya kalau begitu. Menkeunya tidak pro terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi biar dicatat oleh masyarakat *gitu loh*," ujar Charles saat menanggapi permohonan BP2MI terkait audiensi. • **uc/sf**



FOTO: GERALDI/ANIL

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dede Yusuf: Jalur Mandiri PTN Sebaiknya Dihapus



FOTO:DEVI/NVL

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kasus penerimaan mahasiswa Jalur Mandiri di Universitas Lampung (Unila), harus menjadi cambuk untuk perbaikan tata kelola penerimaan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat Jalur Mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan pejabat di PTN di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Selasa (23/8).

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, pemerintah bersama PTN di seluruh wilayah Indonesia harus menyadari bahwa sejatinya Jalur Mandiri adalah afirmasi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus, misalnya dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu, atau terkendala persoalan lainnya. Dede bahkan mengusulkan agar penerimaan jalur mandiri dihapuskan.

"Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan test seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur. Sehingga tidak terjadi *lobby-lobby*

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.

”

BAIKNYA MEMANG JALUR MANDIRI DI PTN ITU DIHAPUS SAJA. DIGANTI DENGAN TEST SELEKSI RESMI, GELOMBANG 1, 2, DAN 3.

bawah tangan. Dan transparan penggunaannya. Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN," tambah Dede.

Sementara itu untuk jalur afirmasi, tegas Dede, harus diperuntukkan untuk siswa berbakat dalam bidang non-akademik seperti olahraga, pramuka, seni, dan sebagainya. Kemudian juga untuk siswa berkebutuhan khusus

dan atau mahasiswa dari daerah 3T. Legislator dapil Jawa Barat II ini juga mengingatkan bahwa jangan sampai dunia akademis tercoreng karena adanya segelintir orang yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya sehingga melakukan cara-cara yang tidak transparan untuk kepentingan pribadi.

Dede mendorong pemerintah secepat mungkin menyelesaikan persoalan sebagai dampak kasus hukum yang melibatkan pejabat di Unila, termasuk kekosongan kepemimpinan di kampus tersebut agar kegiatan kampus tidak terkendala dan tetap bisa berjalan dengan baik. "Patut diingat, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, baik melalui jalur mandiri atau pun regular. Jangan sampai perilaku koruptif pejabat kampus merampas hak-hak warga negara atas pendidikan," tutup mantan Wagub Jabar itu. ● **we/sf**



Anis Byarwati: Kenaikan Harga BBM Dapat Turunkan Kesejahteraan Rakyat

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite dan Solar, dapat menurunkan kesejahteraan rakyat. Hal ini setelah sebelumnya Pertalite dinyatakan pemerintah sebagai barang subsidi. Menurut Anis, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barang, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.

"Ke depan tren harga minyak dunia kemungkinan turun, bahkan dalam RAPBN 2023 Pemerintah mengusulkan ICP 90 US dollar," ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Rabu (24/8). Perlu diperhatikan pula, bahwa inflasi di banyak negara sudah berdampak pada kondisi Indonesia.

Di sisi lain, inflasi tahunan sudah hampir menembus 5 persen dan inflasi makanan telah mencapai angka 10,32 persen. "Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan kembali naik yang efeknya sangat memberatkan bagi rakyat," ujar politisi PKS tersebut.

Anis menjelaskan saat ini aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi mulai berangsur membaik. Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan menghantam kembali daya

beli dan konsumsi masyarakat. Sehingga, berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. "Bahkan pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat hingga naiknya kembali angka kemiskinan," tutur Anis.

Anis pun menyebut rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan efek yang besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM, juga terhadap usaha kecil informal yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah. Selama ini, tambahnya, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut

memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahanya.

"Efek domino kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin kolaps, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat," tegas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Menurut Anis, saat ini dengan mempertimbangkan berbagai situasi, apalagi Pemerintah telah menyebut ke depannya situasi ekonomi akan sulit dan gelap, maka sebaiknya kebijakan BBM bersubsidi diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja. Seperti angkutan umum atau motor roda dua berkapasitas mesin rendah. • rdn/sf

Anggota Komisi XI
DPR RI Anis Byarwati.



FOTO: DOK/NVL



FOTO: ANDRI/NVL

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat RDP Baleg DPR RI dengan HIMBARA dan PERBANAS.

Bahas RUU P2SK, Baleg Terima Masukan dari Himbara dan Perbanas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima masukan dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) sebagai bagian dari harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Menurut Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, pertemuan tersebut guna memantapkan konsepsi baik dari sisi aspek teknik maupun aspek substansi.

Untuk itu masukan dari Himbara dan Perbanas dinilai sangat berharga terutama terkait dengan industri perbankan yang sangat dinamis

sekarang. "Kemudian belum lagi inovasi bisnis itu bersentuhan langsung dengan inovasi teknologi, digital *banking*, tadi ada *peer to peer lending*, maupun yang lain-lain, makannya itu penting untuk kita lakukan," ujarnya di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).

Supratman menambahkan, secara garis besar, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan industrinya, melainkan juga mengatur bagaimana koordinasi antara lembaga jasa keuangan, yakni, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, Bank

Indonesia sebagai otoritas moneter, pengawas perbankan pada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Undang-undang ini juga mengamanatkan sebagai protokol atau jaring pengaman krisis. Itu sentuhan-sentuhannya ke sana tetapi karena kita menghadapi perubahan dinamika geopolitik yang semakin tidak menentu, belum lagi menyangkut soal bagaimana kita memenuhi pembiayaan di APBN kita. Karena Perppu kemarin kan akan berakhir di tahun 2023, defisit anggaran harus maksimal dibuat 3 persen, ini semua menjadi protokol untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan ke depan," pungkas politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, jelas Supratman, aspek lain yang juga turut dibahas dalam RUU P2SK tersebut adalah persoalan penguatan kelembagaan keuangan, perlindungan data pribadi konsumen yang juga dibahas dalam satu bab khusus menyangkut soal inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga pengaturan tentang industri kripto. • [ts,bia/sf](#)

Banggar Apresiasi Kedisiplinan Pemerintah Kelola Belanja Negara di Situasi Tak Menentu

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kedisiplinan pemerintah dalam mengelola belanja negara di tengah situasi yang serba tidak menentu. Kedisiplinan itu tercermin pada realisasi belanja negara yang mencapai Rp2.786,4 triliun atau 101,34 persen.

"Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.000,7 triliun serta transfer ke daerah Rp785,7 triliun," ujar Said saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan RI terkait Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Di sisi lain, hasil dari kedisiplinan dalam pengelolaan APBN tersebut adalah terkendalinya defisit APBN pada tahun 2021. Defisit anggaran mencapai Rp775,6 triliun atau berada pada level 4,57 persen dibandingkan PDB. Angka defisit ini, menurut Said, jauh lebih rendah

dari patokan dalam APBN sebesar 5,7 persen.

"Dengan defisit yang lebih rendah, yang ditopang membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, maka APBN 2021 menyisakan SILPA sebesar Rp96,6 triliun," jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain itu, menurut Said, kedisiplinan pengelolaan belanja juga terwujud dalam penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Diketahui, SAL di awal 2021 berjumlah Rp388,1 triliun.

Selama tahun berjalan anggaran 2021, SAL tersebut digunakan sebesar Rp143,9 triliun.

Sehingga, dengan memperhitungkan tambahan SILPA 2021 dan penyesuaian SAL, SAL di akhir 2021 mencapai sejumlah Rp337,7 triliun. "Cadangan SAL akhir 2021 inilah yang ikut membantu APBN 2022," tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. ●
rdn/sf

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: JAKA/NVL

Perempuan dalam Politik Harus Ciptakan Kebijakan Publik yang Mengafirmasi Kebutuhan Perempuan



Foto bersama Anggota BKSAP DPR RI yang tergabung dalam WAIPA usai mengikuti *briefing session*.

Wakil Ketua
Women

Parliamentarians AIPA (WAIPA) Irene Yusiana Roba Putri mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terutama dalam Parlemen, bukan sekadar penambahan jumlah Anggota Parlemen Perempuan. Melainkan juga bagaimana perempuan di Parlemen bisa memperkuat strategi dalam menciptakan kebijakan publik yang mampu mengafirmasi berbagai

kebutuhan perempuan.

"Tugas kita bersama, bukan hanya bagaimana kita menambah jumlah anggota perempuan di parlemen. Tapi bagaimana anggota parlemen perempuan mampu mengembangkan atau meningkatkan produk hukum, baik itu dalam bentuk perundang-undangan ataupun dalam berbagai kebijakan lainnya, termasuk penganggaran yang lebih berpihak pada perempuan dan anak," papar Irene dalam acara *briefing session: The Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19*

Recovery," di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/8).

Di DPR RI sendiri, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI yang juga perempuan, Puan Maharani, telah menghasilkan beberapa undang-undang yang cukup mengafirmasi kebutuhan perempuan. Salah satunya yang baru-baru ini disahkan DPR RI adalah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dan tentu ke depan masih banyak rancangan undang-undang baru yang tengah disusun dan dibahas DPR RI bersama pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak.

"Sebut saja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Itu saya pikir menjadi pintu gerbang untuk kita mengakomodir kebutuhan perempuan dan khususnya anak dalam rangka menciptakan generasi emas ke depan. Karena memang faktanya, angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Peran perempuan atau peran ibu lah menjadi kunci untuk menjawab atau pun mendukung terciptanya generasi emas bangsa ini. Dan peran anggota parlemen perempuan juga untuk merubah itu semua dan menjadikan generasi ke depan sebagai generasi emas," papar Irene yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut. ● **ayu/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Peringati HUT DPR, PIA DPR Gelar Donor Darah

Bulan Agustus menjadi bulan yang bersejarah sekaligus membahagiakan bagi Bangsa Indonesia.

Setidaknya dua hari bersejarah tercipta di bulan Agustus. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diperingati setiap 17 Agustus, serta Hari Lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 29 Agustus 1945.

Memperingati HUT ke-77 DPR RI, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menyelenggarakan donor darah di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/8). Sebelumnya, pada Kamis (18/8) lalu, PIA DPR RI menggelar tabur bunga dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dalam rangkaian peringatan HUT ke-77 RI.

"Kegiatan donor darah ini kami gelar sebagai bagian dari rangkaian agenda PIA DPR RI di bulan Agustus ini. Setelah peringatan HUT RI dengan tabur bunga dan ziarah ke TMP Kalibata kemarin. Kali ini, kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-77 DPR RI yang jatuh pada tanggal 29 Agustus mendatang," ujar Ketua Umum PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua PIA DPR RI Ade Rachmat Gobel juga menjelaskan bahwa PIA DPR RI sebenarnya ingin menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait perayaan HUT ke-77 DPR RI seperti tahun-tahun sebelum pandemi melanda. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena kasus Covid-19 yang kembali merangkak naik dan status pandemi



FOTO: RUMI/NVL

Pimpinan dan Anggota PIA DPR RI saat menghadiri penyelenggaraan donor darah di DPR RI.

yang juga belum usai sehingga acara difokuskan pada kegiatan sosial.

Terkait dengan acara donor darah, Rustini Muhaimin Iskandar berharap kegiatan sosial ini bisa rutin dilakukan mengingat tingginya kebutuhan darah di DKI Jakarta dan daerah penyangganya. Melalui acara serupa, PIA DPR RI bisa ikut berkontribusi dalam membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Senada dengan Wakil Ketua PIA DPR RI tersebut, Ayu Marwan Cik Asan, selaku ketua Panitia Donor Darah PIA DPR RI mengatakan bahwa donor darah selain bertujuan untuk membantu sesama sejatinya juga bermanfaat untuk pendonor itu sendiri. Donor darah secara rutin dapat merangsang pembentukan sel darah merah yang baru, sehingga membuat tubuh lebih sehat. Hal ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka acara donor darah PIA DPR RI tersebut.

"Kegiatan donor darah merupakan salah satu aksi kemanusiaan yang memiliki banyak manfaat bagi penerima maupun para pendonor. Darah yang kita sumbangkan dapat menolong dan menyelamatkan jiwa. Adapun bagi pendonor kegiatan ini selain memupuk jiwa kemanusiaan juga bermanfaat untuk kesehatan seperti meningkatkan produksi sel darah merah, memperlancar aliran darah dan mencegah penyumbatan arteri," tutur Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam sambutannya.

Di sela kegiatan, Ayu Marwan Cik Asan juga menjelaskan bahwa gelaran donor darah ini diselenggarakan oleh PIA DPR RI masa bakti 2019-2024 bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta, Korpri Setjen DPR RI serta Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) DPR RI. Acara ini terbuka bagi seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Kompleks Parlemen. ● [ayu,uc/sf](#)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Dukungan Keahlian Akuntabilitas Keuangan Negara di Lingkungan DPR RI

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (Puskaji AKN) merupakan lembaga

baru sebagai pengembangan dari unit yaitu Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD di bawah Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Puskaji AKN memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pelaksanaan kegiatan dukungan keahlian tersebut dilakukan oleh fungsional APBN, yaitu berupa analisis/kajian, serta referensi dan telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan.

Kemudian, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), membuat analisis terhadap hasil pengawasan DPD RI atas penindakan lanjutan rekomendasi BPK RI dan pertimbangan



”

“PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA TELAH SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA,”

DPD RI terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI serta membuat *Accountability Brief* dan *Accountability Paper* sesuai dengan kebutuhan Komisi-Komisi dan isu yang sedang berkembang pada saat ini.

Dalam mengerjakan tugas sebagai Analisis, Puskaji AKN juga menerapkan empat nilai yaitu Profesional, Inovatif, Kreatif dan Akuntabel. Puskaji AKN sendiri juga aktif dalam kegiatan di social media terutama dalam meliput kegiatan diskusi dan konfirmasi data atau memposting *Accountability Brief* dan *Accountability Paper*. • **puskaji**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Media DPR Diminta Tingkatkan Strategi Komunikasi



FOTO: RUMI/NVL

Foto bersama Ketua BURT DPR RI dan jajaran pejabat Setjen DPR RI dan narasumber pada Workshop Pengelolaan Pemberitaan Bagian Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta segenap jajaran staf Media Cetak dan Media Sosial di bawah naungan Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi strategi komunikasi. Indra berpesan, setiap hasil kerja bagian Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen bukan hanya berdasarkan output semata akan tetapi lebih dari itu yakni *impact* terhadap publik.

Demikian ditegaskan Indra saat menyampaikan sambutan pembukaan *Workshop* Pengelolaan Pemberitaan Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Medtaksos) Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI dengan tema 'Membangun Sinergitas Pengelolaan Pemberitaan DPR RI dalam Mewujudkan Parlemen Modern' di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/8).

”
PENTINGNYA SEGENAP JAJARAN STAF MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN UNTUK TERUS MEMILIKI PASSION DALAM BIDANG Masing-Masing.

"Pentingnya strategi komunikasi ada di kekuatan mutu individu. Untuk itu, segenap jajaran staf Media Cetak dan Media Sosial harus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi strategi komunikasi. Sinergitas nomor dua, kalau mutu individu belum kuat maka sinergi tidak akan tercapai. Meski *workshop*

bertema sinergitas, tetapi saya ingin menajamkan pada kualitas mutu kerja yang bukan hanya output tetapi juga *impact*," ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra mengingatkan pentingnya segenap jajaran staf Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen untuk terus memiliki *passion* dalam bidang masing-masing. Salah satunya, tutur Indra, wujud *passion* tersebut yakni menjadi amplifikasi hasil kinerja DPR dengan memanfaatkan kemajuan teknologi *gadget* melalui akun media sosial masing-masing staf sebagaimana pernah diusulkan beberapa tahun lalu oleh mantan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

"Saya jadi teringat pesan eks-Ketua DPR 4 tahun lalu bahwa seharusnya masing-masing pegawai Sekretariat Jenderal memanfaatkan medsos sebagai amplifikasi kegiatan kinerja dewan. Hari ini informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat terlebih didukung kemajuan akses teknologi di era keterbukaan informasi dan era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) saat ini. Teman-teman harus pahami bahwa anda sebagai pengelola atau kru awak media di DPR itu punya tanggung jawab besar menjadi bagian dari DPR sebagai *passion*," tandas Indra lebih lanjut.

Turut hadir Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso. Deputi Bidang Administrasi sekaligus Plt Inspektoral Utama Setjen DPR RI Sumariyandono, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Irfan, Kepala Sub Bagian Media Cetak Wiryawan Suwiryo, Kepala Sub Bagian Media Sosial Nita Juwita, Kepala Sub Bagian Analisis Media Suciati dan seluruh segenap jajaran staf Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. • **pun/aha**



Nasril Bahar Gantikan Bakri Sebagai Wakil Ketua BURT DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar melantik Anggota DPR RI Nasril Bahar sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Nasril menggantikan rekannya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bakri HM.

Dalam rapat yang digelar secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan di Ruang Rapat BURT Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8) itu, Muhaimin membacakan keputusan Fraksi PAN DPR RI dan diakhiri penyerahan palu sidang kepada para Pimpinan BURT DPR RI.

Nasril diketahui merupakan Anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III. Legislator kelahiran

Medan, 58 tahun silam ini juga tergabung dalam salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu Komisi VII DPR RI.

Adapun kini, komposisi Pimpinan BURT DPR RI meliputi, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso (F-Demokrat), dan empat Wakil Ketua, yakni Johan Budi (F-PDIP), Novita Wijayanti (F-Gerindra), Achmad Dimyati Natakusumah (F-PKS), dan Nasril Bahar (F-PAN). • **tn/aha**

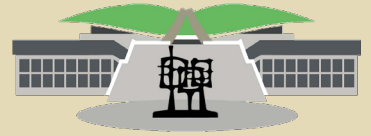


FOTO: ANDRI/ANIL

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat melantik Anggota DPR RI Nasril Bahar sebagai Wakil Ketua BURT DPR RI.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tanggapan pemerintah dari pandangan seluruh Fraksi DPR RI terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). FOTO: JAKA/NVL



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 7 Pejabat Fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8). FOTO: PRIMA/NVL



Perpustakaan DPR RI bersama Arena Publishing menggelar Festival Knockout Entrepreneur Forum dan Launching Buku 'Growing Business, Extra Ordinary People & Transform Nation' di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). FOTO: DEVI/NVL

